



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1968
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG TIMAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertegas struktur dan prosedur kerja untuk memperlancar dan meningkatkan produksi sesuai dengan isi dan jiwa Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967, dipandang perlu untuk segera mengadakan reorganisasi dalam struktur perusahaan-perusahaan tambang yang pada dewasa ini berada dalam lingkungan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Timah Negara;
 - b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk membentuk suatu Perusahaan Negara baru yang akan menampung semua kegiatan dalam pengurusan dan pengusahaan semua bahan-bahan galian timah.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966;
 3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 87, 95, 96 dan 97 tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Perdatam No. 2493/M/Perdatam 1961 tanggal 19 Agustus 1961.

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah.

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I. PELEBURAN DAN PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Tambang Timah, selanjutnya disebut P.N. Tambang Timah, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960;
- (2)
 - a. Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Timah Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 111)
 - b. P.N. Tambang Timah Belitung, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 119)
 - c. P.N. Tambang Timah Bangka, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 120)
 - d. P.N. Tambang Timah Singkep, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 97 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun .1961 No. 121)
 - e. Proyek Peleburan Timah Muntok, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan tanggal 19 Agustus 1961 No. 2493/M/Perdatam/61,
dengan Peraturan Pemerintah ini dilebur kedalam P.N. Tambang Timah.

(3) Segala...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan, kekayaan termasuk cadangan-cadangan serta usaha-usaha lainnya dari badan/proyek tersebut ayat 2 a sampai dengan e pasal ini beralih kepada P.N. Tambang Timah;
- (4) Soal-soal yang timbul dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini diatur oleh Menteri.

BAB II. KETENTUAN UMUM.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia,
- b. "Menteri" ialah Menteri yang diberi wewenang penguasaan bidang Pertambangan,
- c. "Departemen" ialah Departemen Pemerintah, yang diberi wewenang penguasaan bidang Pertambangan,
- d. "Perusahaan" ialah P.N. Tambang Timah,
- e. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan,
- f. "Kuasa Direksi" ialah Kepala Unit-unit Produksi,
- g. "Unit Produksi" ialah:
 - 1. Unit Penambangan Timah Bangka ialah ex P.N. Tambang Timah Bangka, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 120).
 - 2. Unit Penambangan Timah Belitung ialah ex P.N. Tambang Timah Belitung, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 119).

3. Unit...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Unit Penambangan Timah Singkep ialah ex P.N. Tambang Timah Singkep, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 97 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 121).
4. Unit Peleburan Timah Mentok ialah ex Proyek Peleburan Timah Mentok, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan tanggal 19 Agustus 1961 No. 2493/M/Perdatam/61. Unit-unit lain yang dianggap perlu ditetapkan kemudian oleh Menteri.

BAB III.

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN.

BAGIAN KESATU.

Umum.

Pasal 3.

- (1) Perusahaan adalah Badan Hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4.

Tempat kedudukan.

Perusahaan dan Direksi berpusat dan berdomicili di Jakarta dengan Unit-unit Produksi di wilayah wilayah kerja seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan dengan Keputusan Menteri dapat mendirikan perwakilan ditempat yang diperlukan.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5.

Tujuan dan lapangan usaha.

- (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang turut membangun ekonomi Nasional berdasarkan Pancasila dengan jalan menghasilkan laba baik berupa devisa dan ataupun rupiah bagi Negara demi kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat;
- (2) Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi seluruh warga negara Indonesia agar dapat memberikan dharma baktinya dan membuat kariernya dalam lapangan pertambangan bahan galian timah berdasarkan pendidikan, keahlian, pengalaman, kecakapan dan kemampuannya;
- (3) Perusahaan bergerak dibidang kegiatan-kegiatan explorasi, exploitasi, pengolahan, peleburan, pemurnian dan pemasaran bahan-bahan galian tambang timah;
- (4) Dalam hal Perusahaan mengadakan kontrak dengan pihak lain, maka dengan Keputusan Menteri, Perusahaan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan kontrak tersebut.

BAGIAN KEDUA.

Modal Perusahaan.

Pasal 6.

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara sebesar yang tercantum dalam neraca penutupan per 31 Mei 1968 dari Badan/ Proyek tersebut ayat (2) a s/d e Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan neraca pembukaan dari Perusahaan per 1 Juni 1968;

(2) Modal...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah;
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini;
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia;
- (5) Semua alat liquide disimpan dalam bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

BAGIAN KETIGA.

Pimpinan Perusahaan.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin dan dikendalikan oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh beberapa orang Direktur yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri menurut kebutuhan dan perkembangan perusahaan.
- (2) Pimpinan dan penanggung jawab dari Perusahaan adalah Direktur Utama dan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.
- (3) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Menteri dapat menunjuk seorang Pejabat dan atau Badan dalam lingkungan Departemen untuk menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan tugasnya sehari-hari terhadap perusahaan.
- (5) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Menteri untuk jangka waktu selama-lamanya lima tahun; setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian akan merupakan "pemberhentian tidak dengan hormat" jika tindakan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan c pasal ini merupakan tindak pidana yang terbukti syah menurut hukum.
- (4) Sebelum pemberhentian tersebut dalam ayat (2) huruf b dan c pasal ini diputuskan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah oleh Menteri diberitahukan kepadanya tentang rencana Menteri untuk memberhENTIKANNYA.

(5) Selama...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) pasal ini belum diputus, maka Menteri memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan ayat (2) huruf b dan c pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, terkecuali apabila untuk keputusan pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (3) pasal ini diperlukan vonnis pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 9.

- (1) Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia.
- (2) Antara a anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus ataupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri, atau jabatan yang dipikulkan oleh Presiden kepadanya.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba.

Pasal 10...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10.

- (1) Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dengan seizin Menteri atau Pejabat/Badan yang dimaksud dalam ayat (4) Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini dapat menyerahkan kekuasaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada salah seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 11.

- (1) Unit Produksi dipimpin oleh seorang Kuasa Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Direktur Utama.
- (2) Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 12.

- (1) Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Kuasa Direksi bertugas melaksanakan rencana produksi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya dari Direksi yang telah ditetapkan.
- (4) Untuk kelancaran tugas-tugas perusahaan diadakan rapat berkala antara Direksi dan Kuasa Direksi.

(5) Tata-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) Tata-tertib serta pembagian tugas dan tata-cara menjalankan pekerjaan antara para anggota Direksi dan antara Direksi-direksi dengan Kuasa Direksi serta susunan organisasi perusahaan diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Menteri atas usul Direktur Utama.

BAGIAN KEEMPAT.

Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 13.

- (1) Semua pegawai perusahaan, termasuk Kuasa Direksi dan anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi yang berlaku terhadap Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus atau semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama melalui Direktur yang bersangkutan untuk langsung meneruskannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(4) Pegawai...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Pegawai termaksud ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirim pertanggung jawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya.

- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi perusahaan, disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5), untuk sementara dipindahkan ke Direktorat Akuntan Negara.

BAGIAN KELIMA.

Keuangan dan kegiatan perusahaan

Pasal 14.

Tahun buku.

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim.

Pasal 15...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 15.

Anggaran perusahaan.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran perusahaan Kepada Menteri untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Pasal 16.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara waktu yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 17.

Laporan perhitungan tahunan.

- (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dan perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Jika...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah diterimanya perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disyahkan.
- (4) Jika pengesyahan perhitungan tahunan yang hanya dapat dilakukan oleh Menteri telah terselenggara, maka hal ini berarti pula pemberian pembebasan kepada Direksi dari segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Pasal 18

Penggunaan laba.

- (1) Dari laba bersih yang telah disyahkan menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah ini disisihkan untuk:
 - a. dana pembangunan umum sebesar 25%.
 - b. dana untuk pengembangan perusahaan sebesar 30%.
 - c. untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan-sumbangan sebagai berikut:
 - dana pensiun 4%.
 - dana sosial 6%.
 - dana pendidikan 7%.
 - jasa produksi 5%.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi, bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Cara...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan yang bertujuan seperti termaksud pada Pasal 18 ayat
- (2) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1960 No. 59) ditentukan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

BAGIAN KETUJUH.

Pembubaran perusahaan.

Pasal 19.

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukkan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB IV.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 20.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pengaturannya oleh Menteri.

Pasal 21...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 21.

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut, Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perusahaan Tambang Timah".

Pasal 22.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1968.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1968.

Sekretaris Negara R.I.,

ttd

ALAMSYAH

Mayor Jenderal T.N.I.